



Original Article

Tata Kelola Bencana dan Bicara Belanja: Sinkronisasi Anggaran, Respons Publik, dan Keuangan Negara di Provinsi Lampung

Risma Pitriani Nuryana^{1✉}, M Reza Andrea Putra²

^{1,2} Administrasi Publik - Universitas Indonesia Mandiri - Lampung

Correspondence Author: rismapitrianinuryana@uimandiri.ac.id[✉]

Abstract:

Disaster governance is a strategic issue in public administration and public finance, particularly in disaster-prone regions such as Lampung Province, Indonesia. Public expenditure at both national and subnational levels plays a crucial role in supporting disaster prevention, mitigation, emergency response, and post-disaster rehabilitation and reconstruction. However, the magnitude of budget allocation does not necessarily guarantee effective disaster management if it is not supported by sound governance, optimal budget synchronization between central and local governments, and positive public response. The phenomenon of “talking about spending” reflects increasing public concern regarding transparency, accountability, and the proper use of public funds in disaster management. This study aims to analyze disaster governance in Lampung Province from the perspectives of budget synchronization, public response, and its implications for state finance. The research employs a qualitative approach using literature review and policy analysis methods. Secondary data are derived from regulatory documents, central and local government financial reports, disaster management reports in Lampung, and relevant academic publications. The data are analyzed thematically to assess the alignment between disaster expenditure policies and the principles of good governance. The findings indicate that disaster-related public spending in Lampung Province continues to face challenges, particularly budget misalignment between central and local governments as well as gaps between planning and implementation stages. These issues contribute to delays in budget realization, inefficiencies in spending, and negative public perceptions. Public response is influenced not only by the size of the budget but also by transparency, accountability, and clarity of information regarding fund utilization. This study addresses a research gap by integrating disaster governance, public expenditure, and public response into a single analytical framework, offering policy implications for strengthening governance and ensuring the sustainability of public finance.

Submitted	: 1 January 2026
Revised	: 30 January 2026
Acceptance	: 7 February 2026
Publish Online	: 8 February 2026

Keywords: disaster governance; public expenditure; budget synchronization; public response; public finance; Lampung Province.

Pendahuluan

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, baik bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor maupun bencana geologi dan kebencanaan pesisir. Kondisi geografis tersebut menuntut kesiapan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membangun sistem tata kelola bencana yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan [Muhammad, P. T. \(2021\)](#). Dalam konteks ini, belanja negara dan belanja daerah memegang peranan strategis sebagai instrumen utama dalam mendukung kegiatan pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Lampung. Seiring meningkatnya frekuensi dan dampak bencana di Lampung, perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran penanggulangan bencana juga semakin besar. Fenomena “bicara belanja” menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya menilai kebijakan pemerintah dari besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari bagaimana anggaran tersebut direncanakan, direalisasikan, dan dipertanggungjawabkan. Transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran belanja publik menjadi faktor penting dalam membentuk kepercayaan masyarakat Lampung terhadap kinerja pemerintah daerah dan pusat [Isnaini, N. \(2025\)](#).

Dalam praktiknya, tata kelola belanja bencana di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan. Sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam situasi darurat yang membutuhkan fleksibilitas fiskal dan kecepatan pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, prosedur birokrasi, serta koordinasi antarinstansi sering kali menjadi kendala dalam realisasi anggaran bencana [Sopyan, E., & Putra, M. R. A. \(2025\)](#). Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan, inefisiensi belanja, serta ketidaktepatan sasaran program penanggulangan bencana, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas pengelolaan keuangan negara. Kajian akademik mengenai penanggulangan bencana di tingkat daerah selama ini cenderung berfokus pada aspek teknis kebencanaan dan manajemen risiko, sementara kajian keuangan negara lebih menitikberatkan pada disiplin fiskal dan efektivitas belanja secara makro [Sulistio, H. \(2022\)](#) & [Oktaviani, I. \(2022\)](#). Penelitian yang mengintegrasikan tata kelola bencana daerah, sinkronisasi belanja negara dan daerah, serta respons publik dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas [Nurhayati, N. \(2025\)](#). Keterbatasan kajian integratif ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, khususnya dalam konteks daerah seperti Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola bencana di Provinsi Lampung melalui perspektif sinkronisasi anggaran, respons publik, dan keuangan negara [Ruswandi, D. \(2024\)](#). Dengan pendekatan integratif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan pengelolaan belanja bencana di tingkat daerah serta implikasinya terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan fiskal. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tata kelola bencana berbasis daerah dengan menghubungkan aspek administrasi publik dan keuangan negara Salam, [R., Bahasruddin, A., Wijaya, I. D., & Faisal, M. \(2024\)](#). Secara praktis, hasil penelitian ini

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan belanja bencana yang lebih sinkron, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Provinsi Lampung.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen peraturan perundang-undangan, laporan keuangan pemerintah, laporan penanggulangan bencana, hasil audit, serta publikasi ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi untuk mengkaji kesesuaian antara kebijakan belanja bencana dengan prinsip tata kelola yang baik, serta keterkaitannya dengan respons publik dan pengelolaan keuangan negara.

Hasil

Sinkronisasi Anggaran dalam Tata Kelola Bencana di Provinsi Lampung

Sinkronisasi anggaran merupakan elemen kunci dalam tata kelola bencana yang efektif, khususnya di Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik kebencanaan beragam dan kompleks. Dalam konteks ini, sinkronisasi tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tetapi juga menyangkut koordinasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pendanaan bencana di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai regulasi, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi kendala struktural dan administratif. Di Lampung, perbedaan prioritas pembangunan daerah, keterbatasan kapasitas fiskal, serta prosedur realokasi anggaran sering menyebabkan keterlambatan respons fiskal pada situasi darurat. Ketidaksinkronan anggaran ini berdampak langsung pada efektivitas penanganan bencana. Bantuan yang terlambat atau tidak tepat sasaran berpotensi memperbesar kerugian sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa tata kelola keuangan publik yang lemah dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam merespons bencana secara cepat dan adaptif ([UNDRR, 2019](#)). Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi anggaran pusat-daerah menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola bencana di Lampung.

Respons Publik terhadap Belanja Bencana

Respons publik merupakan dimensi penting yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam kajian belanja bencana. Di Provinsi Lampung, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran bencana sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ketika informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana bencana tidak disampaikan secara terbuka, masyarakat cenderung membangun persepsi negatif yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja bencana tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga bersifat komunikatif dan politis. Sejumlah studi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik berperan penting dalam membentuk kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana (OECD, 2020). Dalam konteks Lampung, komunikasi kebijakan yang efektif menjadi kebutuhan mendesak, mengingat masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepastian informasi terkait bantuan dan program pemulihan. Respons publik yang

positif akan memperkuat legitimasi kebijakan belanja bencana, sementara respons negatif berpotensi menghambat implementasi kebijakan di lapangan.

Implikasi terhadap Keuangan Negara dan Daerah

Belanja bencana yang tidak dikelola secara sinkron dan akuntabel dapat memberikan tekanan signifikan terhadap keuangan negara dan daerah. Di Provinsi Lampung, ketergantungan pada transfer pusat untuk pendanaan bencana menunjukkan pentingnya pengelolaan fiskal yang hati-hati agar tidak mengganggu keberlanjutan anggaran daerah. Ketika belanja bencana tidak direncanakan dengan baik, risiko inefisiensi dan pemborosan anggaran menjadi semakin besar, yang pada akhirnya dapat melemahkan disiplin fiskal. Temuan pembahasan ini sejalan dengan teori keuangan publik yang menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas fiskal dan akuntabilitas anggaran dalam situasi krisis ([Musgrave & Musgrave, 1989](#)). Dengan demikian, tata kelola bencana di Lampung perlu diarahkan pada penguatan perencanaan anggaran berbasis risiko, peningkatan transparansi belanja, serta integrasi respons publik dalam evaluasi kebijakan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana sekaligus menjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangan negara.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola bencana di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya dalam aspek sinkronisasi anggaran, respons publik, dan pengelolaan keuangan negara. Ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan belanja bencana, baik di tingkat pusat maupun daerah, berimplikasi pada keterlambatan penanganan, inefisiensi penggunaan anggaran, serta menurunnya kepercayaan masyarakat. Selain itu, respons publik terhadap belanja bencana tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan informasi yang disampaikan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak semata-mata bergantung pada kapasitas fiskal, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan komunikasi kebijakan.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat melalui mekanisme perencanaan anggaran bencana yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan fleksibilitas anggaran darurat dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Selain itu, pengembangan sistem informasi belanja bencana yang transparan dan mudah diakses publik menjadi langkah penting untuk meningkatkan respons dan kepercayaan masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui pelatihan penganggaran kebencanaan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Isnaini, N. (2025). Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan E-Procurement terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Good Governance sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Pemerintah Kota Jambi) (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

- Muhammad, P. T. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kabupaten Lampung Barat) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Nurhayati, N. (2025). Meningkatkan Motivasi Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kolaboratif: Integrasi Faktor-faktor Kunci (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Oktaviani, I. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I) (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *Transparency, communication and trust: The role of public communication in responding to the wave of disinformation about the new coronavirus*. OECD Publishing, Paris.
- Ruswandi, D. (2024). *Tata Kelola Kolaboratif: Solusi Ketahanan Hutan di Indonesia*. Deepublish.
- Salam, R., Bahasruddin, A., Wijaya, I. D., & Faisal, M. (2024). Strategi Meningkatkan Resiliensi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Pada Era Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 309-326.
- Sopyan, E., & Putra, M. R. A. (2025). Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan: Studi Kasus Dinas PUPRP Kabupaten Ciamis. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 5(1), 139-155.
- Sulistio, H. (2022). Risiko Korupsi dalam Penanganan Pandemi Covid-19: Pembelajaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 dan 2021.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2019). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2019*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)